

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu pendidikan menjadi sasaran perhatian pemerintah. Pendidikan dapat diperoleh oleh siapapun seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Amanat UUD 1945 ini diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara garis besar membahas mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara, pelaksana maupun peserta pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara dengan rentang usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pengertian pendidikan dasar menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 yaitu (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal serupa juga disampaikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; Pasal 6 Ayat (1) bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; dan Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Amanat-amanat yang telah disampaikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diwujudkan dalam wajib belajar. Wajib Belajar pertama kali dilaksanakan pada tahun 1989 dengan program Wajib Belajar 9 Tahun. Kemudian secara bertahap, pemerintah meningkatkan strata pendidikan dalam wajib belajar yaitu Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan pada tahun 1994 dan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2015. Adanya program wajib belajar ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah anak-anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan.

Meski pemerintah telah mewajibkan “belajar”, nyatanya masih ada putra-putri Indonesia yang tidak menempuh pendidikan. Banyak dari anak-anak tersebut yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Survei Nasional atau Susenas mencatat angka putus sekolah yang masih tinggi. Pada tahun 2015, tercatat masih ada 5,3 juta anak dengan usia 7-18 tahun di Indonesia yang tidak

bersekolah dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,6 juta anak (Shelmi, 2019).

Banyak hal yang menyebabkan anak putus sekolah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian tentang Hasil Bantuan Siswa Miskin *Endline* di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan (CNN Indonesia, 2017). Artikel tersebut menyebutkan alasan yang menjadi penyebab anak-anak harus rela tidak mengeyam pendidikan. Penelitian tersebut menghasilkan terdapat 47,3% responden tidak lagi menempuh pendidikan lagi karena masalah biaya, 31% berkeinginan untuk membantu orang tua bekerja, dan 9,4% ingin meneruskan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus lainnya (CNN Indonesia, 2017).

Media Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Biarkan Anak Sekolah (Lagi)” menyebutkan bahwa angka putus sekolah yang tinggi berbanding lurus dengan anak yang menjadi buruh (Wibowo, 2017). Data BPS pada 2017 menyebutkan bahwa lebih dari 2 (dua) juta anak Indonesia memutuskan untuk menjadi buruh dan berhenti sekolah. Sebagian besar dari mereka menjadi buruh di bidang pertanian dan jasa, sedangkan sisanya (2,5%) memilih untuk berwirausaha. Meski pemerintah telah “meneriakkan” gerakan ayo sekolah, namun masih ada orang tua yang menganggap bahwa sekolah bukan prioritas utama. Anak-anak yang menjadi buruh dan membantu orang tua mereka bukan tidak mungkin kehilangan keinginan dan motivasi untuk bersekolah. Angka putus sekolah akan memberi pengaruh pada peningkatan kemiskinan. Putus sekolah menyebabkan jumlah

pengangguran bertambah dan kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh pengangguran semakin tinggi. Seperti siklus yang tidak ada akhirnya, pendapatan yang rendah menyebabkan sulitnya akses pendidikan formal untuk dicapai.

Masalah kemiskinan dan ekonomi tidak seharusnya menghambat seorang anak untuk memperoleh pendidikan demi mencapai masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan sepenuhnya. Pemerintah kemudian mengeluarkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah mengenai biaya pendidikan. Dana BOS merupakan bantuan dana dari pemerintah untuk membantu sekolah menyokong penyelenggaraan operasional sekolah. Adanya dana BOS ini diharapkan sekolah tidak lagi memungut biaya pendidikan pada wali murid dalam bentuk apapun.

Dana BOS mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 sebagai program pendukung percepatan wajib belajar. Latar belakang munculnya Dana BOS adalah untuk membenahi keadaan pendidikan Indonesia. Pemerintah pada bulan Maret 2005 memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memindahkan alokasinya untuk Dana BOS.

Dana BOS diberikan kepada sekolah di tingkat SD dan SMP dengan tujuan untuk mengangkat tanggungan masyarakat, khususnya mereka yang miskin dalam hal pendidikan. Secara umum, untuk tingkat SD dan SMP Dana BOS memiliki tujuan untuk:

- a. Membebaskan biaya operasi pendidikan bagi peserta didik di tingkat SD dan SMP negeri;
- b. Membebaskan peserta didik miskin di sekolah negeri dan swasta dari berbagai bentuk pembiayaan;
- c. Meringankan peserta didik di sekolah swasta dari beban pembiayaan operasional.

Berbeda dengan pemberian beasiswa melalui program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang pendidikan, Dana BOS diserahkan kepada seluruh siswa dalam satuan pendidikan. Sejak muncul pada tahun 2005 hingga saat ini, Dana BOS telah mengalami berbagai perbaikan baik dari peraturan maupun jumlah Dana BOS yang diterima oleh peserta didik. Dana BOS yang diberikan kepada siswa di tingkat SD pada tahun 2005 yaitu Rp235.000,00 per tahunnya. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2018, dana BOS yang diterima oleh siswa SD yaitu sebesar Rp800.000,00/peserta didik/tahun (delapan ratus ribu rupiah). Selain besaran dana BOS, perubahan juga terjadi dalam alur penerimaan dana BOS. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pusat menyalurkan dana BOS melalui Dinas Pendidikan tingkat provinsi yang diteruskan ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah. Saat ini penyaluran dana BOS disalurkan langsung oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi ke sekolah-sekolah dan tidak melalui Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota dengan harapan proses pencairan dana BOS dapat berlangsung lebih cepat.

Penyaluran dilaksanakan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada sekolah melalui rekening sekolah yang telah terdaftar dalam Dapodik. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa penyaluran Dana BOS seringkali mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyaluran dana BOS ini menghambat pelaksanaan Dana BOS di sekolah, terutama sekolah negeri yang sumber dananya hanya berasal dari BOS saja. Hal ini menyebabkan sekolah terpaksa untuk melakukan pinjaman ke guru agar operasional sekolah dapat berjalan.

Semua murid yang terdaftar dalam sistem Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) baik dari sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan dana BOS sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam kabupaten penerima dana BOS memiliki 432 Sekolah Dasar dengan total peserta didik berjumlah 59.172 siswa pada tahun 2018. Kabupaten Temanggung menerima total dana BOS sebesar Rp18.943.040,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah) pada triwulan III Tahun 2018. Salah satu sekolah penerima Dana BOS adalah SDN 2 Kwadungan Gunung. Besaran Dana BOS yang dialokasikan ke SDN 2 Kwadungan Gunung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp59.200.000,00.

Dana BOS yang sudah diterima oleh sekolah kemudian dianggarkan dan digunakan dengan merujuk pada Juknis BOS dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada pelaksanaan Dana BOS, sekolah wajib memahami dan menaati Juknis BOS dimulai dari penganggaran, penggunaan hingga pelaporannya. Dana BOS harus dianggarkan dan digunakan sesuai dengan aturan-aturan

penggunaannya yang telah tercantum dalam Juknis BOS. Juknis BOS yang digunakan pada tahun 2018 yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan bahwa terdapat 11 komponen kegunaan Dana BOS, yaitu:

- a. Pengembangan perpustakaan;
- b. Kegiatan penerimaan siswa baru;
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- e. Pengelolaan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah;
- g. Langganan sarana dan prasarana sekolah;
- h. Pembelian sarana dan prasarana sekolah;
- i. Pembayaran honorer;
- j. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran; dan
- k. Biaya lainnya.

Sebelas poin komponen pembiayaan BOS tersebut menjadi acuan bagi sekolah untuk mengalokasikan dana BOS. Namun pembatasan dalam penggunaan BOS ini menyebabkan beberapa komponen menjadi tidak terpenuhi. Salah satu komponen yang tidak terpenuhi oleh adanya BOS adalah gaji honorer. Juknis BOS Tahun 2018 mengatur pembayaran honor guru dapat menggunakan Dana BOS maksimal 15% dari keseluruhan Dana BOS yang diterima. Berdasarkan batasan alokasi maksimal tersebut, SDN 2 Kwadungan Gunung hanya dapat

menganggarkan sebesar Rp8.820.000 per tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang harus dibayar oleh sekolah. Sehingga dalam hal ini sekolah menerima bantuan dana dari komite sekolah dan wali murid yang sebetulnya tidak diperbolehkan.

Juknis BOS Tahun 2018 menyebutkan bahwa sekolah dalam penganggaran dana BOS wajib untuk mengikutsertakan wali murid dan komite sekolah. Kedua pihak tersebut dapat memberikan saran dan masukan kepada sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS. Selain itu, komite sekolah sendiri memiliki peran sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan dana BOS sehingga proses penganggaran dana BOS dapat berlangsung secara transparan. Namun, *The World Bank* dalam artikelnya yang berjudul “Mengkaji Sepuluh Tahun Bantuan Operasional Sekolah” menyebutkan bahwa dalam memutuskan alokasi anggaran Dana BOS anggota komite jarang dimintai masukan oleh sekolah. Hal yang umum terjadi adalah pihak sekolah akan mengalokasikan dana terlebih dulu kemudian hasil keputusan tersebut disampaikan kepada komite sekolah untuk mendapat persetujuan (The World Bank, 2015).

Sukses atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan tidak terlepas dari peran aktor kebijakan. Berbeda dengan tingkat SMP dan SMP, pada tingkat SD tidak memiliki tenaga khusus yang bertugas untuk menangani dan mengelola dana BOS. Tidak adanya staf khusus yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan dana BOS mau tidak mau tugas tersebut harus dilimpahkan kepada guru. Sedangkan guru sendiri sudah memiliki beban kerja yang berat dan harus ditambah dengan mengurus administrasi Dana BOS.

Tahap penting dalam keseluruhan pelaksanaan Dana BOS adalah tahap pelaporan. Pelaporan dana BOS dapat dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu dibuat dan diproses secara manual oleh bendahara BOS sekolah dan dilakukan secara *online*. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaksana Dana BOS terjadi di tahap pelaporan (Sudjatmiko, 2016). Kepala Inspektorat Kabupaten Temanggung menyebutkan ketidaklengkapan administrasi dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS merupakan kesalahan yang sering ditemukan pada saat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dan instansi lain, seperti Inspektorat Kabupaten Temanggung. Ketidaklengkapan administrasi yang dimaksud yaitu tidak adanya dokumen-dokumen pendukung seperti kuitansi dan nota pembelian barang. Kuitansi dan nota pembelian barang merupakan salah satu lampiran penting yang harus disertakan sebagai bukti atas transaksi pembelian dengan menggunakan dana BOS. Tidak ada tanda bukti transaksi pembelian ini dapat menimbulkan kecurigaan atas adanya penyimpangan. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga menemukan bahwa laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan atau disebut pula belanja fiktif.

Pelaporan dana BOS saat juga dapat dilaksanakan secara *online* melalui situs resmi Dana BOS. Namun belum semua sekolah di Kabupaten Temanggung sudah menggunakan fasilitas tersebut. Sekolah yang sudah melaksanakan pelaporan secara *online* hanya berjumlah 66 dari 432 sekolah pada Triwulan III Tahun 2018.

**Tabel Error! No text of specified style in document..1 Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOS di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018**

Triwulan Tahun	I		II		III		IV	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2014	106	24,54%	105	24,3%	105	24,3%	104	24,07%
2015	112	25,46%	110	25,46%	110	25,46%	109	25,23%
2016	108	25%	105	24,3%	82	18,98%	66	15,28%
2017	NA							
2018	205	47,45%	196	45,37%	66	15,28%	NA	NA

Sumber: diolah dari Situs Web Dana BOS (<http://bos.kemendikbud.go.id/> )

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi laporan penggunaan Dana BOS di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014-2018. Pada tiap triwulannya jumlah sekolah yang melakukan pelaporan dana BOS secara *online* ke laman resmi Dana BOS mengalami fluktuasi. Jumlah pelaporan terendah terjadi pada Triwulan IV Tahun 2017 yaitu sebanyak 66 sekolah. Jumlah yang sama terjadi pada Triwulan III Tahun 2018 setelah terjadi lonjakan besar pada 2 (dua) triwulan sebelumnya pada Tahun 2018. Jumlah pelaporan *online* tertinggi terjadi pada Triwulan I Tahun 2018 dengan jumlah 205 sekolah (47,45%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah SD yang ada di Kabupaten Temanggung telah melakukan pelaporan secara *online* pada triwulan tersebut.

Kebijakan dapat mencapai tujuannya apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan peraturan atau petunjuk pelaksanaannya. Pelaksanaan Dana BOS wajib untuk mengikuti petunjuk teknisnya dari tahap penganggaran, penggunaan dana BOS hingga pelaporannya. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan penulis memutuskan untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Ketepatan Pelaksanaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, berikut merupakan identifikasi masalah yang muncul:

- a. Keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS;
- b. Komponen pembayaran gaji tidak terpenuhi akibat pembatasan penggunaan Dana BOS;
- c. Sekolah menerima dana bantuan dari komite sekolah untuk menutup kekurangan BOS;

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, berikut rumusan masalah yang dipeoleh:

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung?
- b. Apakah pelaksanaan kebijakan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan yang seharusnya?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, berikut yujuan dari penelitian ini

- a. Menganalisis pelaksanaan Dana BOS secara riil di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;

- b. Menganalisis ketepatan pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi dalam kegunaan teoritis, kegunaan praktis dan kegunaan bagi penulis sendiri.

- a. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti dapat menggunakannya untuk menerapkan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, juga untuk mendorong akademisi dan peneliti lain untuk melakukan penelitian khususnya mengenai masalah implementasi kebijakan publik.
- b. Kegunaan praktis
  - 1) Untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Administasi Publik.
  - 2) Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Ketepatan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung” ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait.
- c. Kegunaan Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan lebih mendalami proses yang berlangsung sehingga dapat mendeskripsikan dan menganalisis ketepatan pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

d. Kegunaan Bagi Pembaca

Mendapatkan wawasan dan informasi mengenai “Analisis Ketepatan Pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung”.

### 1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

<b>NO</b>	<b>PENULIS, JUDUL, TAHUN, NAMA JURNAL</b>	<b>TUJUAN DAN METODE PENELITIAN</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>

1.	<p><b>Penulis:</b> Ines Delaney Natasha, Aufarul Marom dan Dewi Rostyaningsih</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Semarang</p> <p><b>Tahun:</b> 2015</p> <p><b>Nama Jurnal:</b></p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program BOS dan faktor pendorong dan penghambatnya di SMPN 2 Semarang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Penggunaan Dana BOS di SMPN 2 Semarang masih belum maksimal karena terdapat pembatasan penggunaan BOS dari Juknis yang menyebabkan beberapa komponen tidak dapat dibiayai. Sedangkan dari segi pengelolaannya sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari LPJ yang disampaikan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan indikator lima “ketepatan” dalam implementasi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan keputusan.</p>
----	---	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Jurnal of Public Policy and Management Review, Vol. 4, No. 3</p>		<p>kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Faktor yang mendorong implementasi program BOS di SMPN 2 Semarang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan komunikasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya finansial dan kakunya peraturan dalam Juknis BOS.</p>	
2.	<p><b>Penulis:</b> Bonita Regina, Saleh</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b></p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu masih adanya</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis meneliti mengenai</p>

	<p>Soeaidy dan Heru Ribawanto</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)</p> <p><b>Tahun:</b> 2015</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 61-66</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di Kota Malang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan kurangnya dana BOS yang diterima oleh sekolah menyebabkan beberapa sekolah meminta dana tambahan kepada orang tua siswa. Selain itu komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Malang dan sekolah tidak berjalan dengan baik. Staf yang dimiliki oleh sekolah juga terbatas sehingga</p>	<p>ketepatan implementasi kebijakan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung dengan menggunakan lima ketepatan dari Riant Nugroho dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>pelaksanaan Dana BOS tidak berjalan secara efektif.</p>	

2.	<p><b>Penulis:</b> Bonita Regina, Saleh Soeaidy dan Heru Ribawanto</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)</p> <p><b>Tahun:</b> 2015</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 61-66</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di Kota Malang.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu masih adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan kurangnya dana BOS yang diterima oleh sekolah menyebabkan beberapa sekolah meminta dana tambahan kepada orang tua siswa. Selain itu komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Malang dan sekolah tidak berjalan dengan baik. Staf yang dimiliki oleh sekolah juga terbatas sehingga pelaksanaan Dana BOS tidak berjalan secara efektif.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis meneliti mengenai ketepatan implementasi kebijakan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung dengan menggunakan lima ketepatan dari Riant Nugroho dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>
3.	<p><b>Penulis:</b> Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati, Rihandoyo</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Penggunaan</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam implementasi BOS adalah hanya 2 dari 4 SMP yang</p>	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota	Nasional No 37 Tahun 2010 dan hubungan antara komunikasi,	memenuhi 13 komponen penggunaan dana BOS dan masih	Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku pada tahun

	<p>Sematang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011)</p> <p><b>Tahun:</b> 2013</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 1 No. 1, hal 171-178</p>	<p>pelaksana program dan implementasi program BOS Tahun 2011.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan sumber data berasal dari 20 responden yang telah ditentukan.</p>	<p>adanya tarikan iuran kepada orang tua siswa untuk pembelian seragam, tambahan mata pelajaran dan perpindahan kelas. Dana BOS memperbaiki sarana dan prasarana yang berdampak pada peningkatan prestasi sekolah.</p>	<p>dimana penelitian dilaksanakan.</p>
4.	<p><b>Penulis:</b> Sherli Marintan Marpaung, Zainal Hidayat</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang</p> <p><b>Tahun:</b> 2017</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program tersebut tepat sasaran dan juga manfaat serta tujuan program BOS.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS di SMP Negeri 3 Semarang sudah cukup baik dilihat dari beberapa aspek, yaitu penyaluran dan penggunaan BOS, larangan penggunaan dana, mekanisme pembelian barang dan jasa, pencatatan barang inventaris, komunikasi, sumber daya,</p>	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada ketepatan implementasi kebijakan Dana BOS dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>Nama Jurnal:</b> Journal of Public Policy and</p>	<p>penelitian deskriptif.</p>	<p>disposisi dan struktur birokrasi. Sekolah juga</p>	

	Management Review, Vol. 6, No, 4		sudah tidak memungut iuran dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa. Namun, penggunaan dana BOS belum dilaksanakan secara maksimal karena adanya keterbatasan dalam pemanfaatan dana BOS.	
5.	<p><b>Penulis:</b> Galih Wardana, Slamet Santoso, Dewi Rostyaningsih</p> <p><b>Judul:</b> Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang</p> <p><b>Tahun:</b> 2013</p> <p><b>Nama Jurnal:</b> Journal of Public Policy and Management</p>	<p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi Program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 dan untuk menjelaskan apakah dana BOS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b></p>	<p>Implementasi BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang sudah sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan BOS yang ditetapkan sudah tercapai. Namun terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan monitoring yang disebabkan oleh lambatnya proses verifikasi. Faktor-faktor yang mendorong implementasi adalah adanya dukungan dari</p>	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan indikator yang berbeda yaitu indikator ketepatan dari Riant Nugroho dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menggunakan model implementasi kebijakan dari Edwards III.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Review, Vol. 2, No. 2, Hal 571-580	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang	pelaksana kebijakan dan adanya transparansi	

		menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.	yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan BOS, kurangnya kesiapan sumber daya, belum adanya kewenangan yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik.	
6.	<b>Penulis:</b> Putu Sucika, I Nyoman Suprpta <b>Judul:</b> Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng	<b>Tujuan Penelitian:</b> Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dana BOS dalam pemerataan pendidikan di SDN 1 Penarukan, Kecamatan Buleleng Tahun 2016 beserta kendala-kendala yang dihadapinya.	Implementasi dana BOS di SDN 1 Penarukan dalam hal alokasi dana BOS sudah berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Begitu pula dengan tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi implementasi alokasi dana BOS sudah	Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis juga memfokuskan mengenai ketepatan pelaksanaannya berdasar aturan yang berlaku yaitu Juknis BOS Tahun 2018 dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan teori Edwards III.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Tahun:</b> 2018 <b>Nama Jurnal:</b>	<b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini berbentuk	berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi adalah	

	Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol. 9, No. 1, Februari 2018, Hal. 61-74	penelitian kualitatif yang akan memberikan jawaban dan mengungkapkan berbagai persoalan terkait implementasi BOS di SDN 1 Penarukan Kecamaran Buleleng Kabupaten Buleleng.	adanya keterlambatan pencairan dana BOS dan minimnya SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki untuk membuat laporan dana BOS.	
--	---	--	--	--

Penelitian pertama dilakukan oleh Ines Delaney Natasha, Aufarul Marom dan Dewi Rostyaningsih. Penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Semarang” ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program BOS dan faktor pendorong beserta penghambatnya di SMPN 2 Semarang. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bahwa penggunaan Dana BOS di SMPN 2 Semarang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh Juknis BOS yang terlalu membatasi penggunaan Dana BOS sehingga terdapat beberapa komponen tidak dapat dibiayai. Meski demikian pengelolaan BOS sendiri berjalan sudah cukup baik yang terlihat dari LPJ yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Faktor-faktor yang mendorong implementasi BOS di SMPN 2 Semarang adalah keterampilan dan pengetahuan yang baik mengenai BOS dari Sumber Daya Manusia yang adadan faktor komunikasi yang dijalankan melalui sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi program BOS di SMPN 2 Semarang berhubungan dengan sumber

daya finansial, yaitu terkait dengan besaran Dana BOS yang diterima oleh sekolah. Selain itu, Juknis BOS yang terlalu kaku juga menghalangi sekolah untuk memanfaatkan Dana BOS yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan lima indikator ketepatan untuk melihat pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung, yaitu ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan dan keputusan.

Penelitian kedua dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)” ditulis oleh Bonita Regina, Saleh Soeaidy dan Heru Ribawanto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BOS yang ada di Kota Malang. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang menghasilkan masih adanya keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS serta keterbatasan jumlah yang diterima oleh sekolah. Adanya keterbatasan Dana BOS tersebut mengharuskan beberapa sekolah untuk meminta tambahan dana kepada wali murid. Selain itu komunikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dan sekolah tidak berjalan dengan baik. Keterbatasan staf yang dimiliki oleh sekolah juga terbatas sehingga pelaksanaan Dana BOS tidak berjalan secara efektif. Penulis meneliti mengenai ketepatan pelaksanaan kebijakan dengan melihat dari lima indikator ketepatan dari Riant Nugroho dan melihat ketepatan mana yang belum sesuai dengan yang seharusnya.

. Penelitian ketiga ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011) yang ditulis oleh

Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati dan Rihandoyo. Hal yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 beserta hubungan antara komunikasi, pelaksana program dan implementasi BOS pada tahun 2011. Dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari 20 responden, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 2 dari 4 SMP di Semarang selatan yang telah memenuhi 13 komponen penggunaan Dana BOS dan masih adanya tarikan iuran kepada orang tua siswa untuk membeli seragam, pembiayaan tambahan pelajaran dan biaya perpindahan kelas. Namun melalui Dana BOS ini membantu sekolah untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang memberi dampak pada peningkatan prestasi sekolah. Perbedaan pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku pada tahun dimana penelitian dilaksanakan.

Penelitian selanjutnya berjudul “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang” yang ditulis oleh Sherli Marintan Marpaung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tepatnya sasaran juga manfaat serta tujuan program BOS telah tercapai. Dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang dihasilkan yaitu deskriptif. Dana BOS di SMP Negeri 3 Semarang implementasinya sudah cukup bagus dilihat dari berbagai aspek, yaitu panyaluran Dana BOS, penggunaan BOS dan larangannya, prosedur pembelian barang dan jasa, pendataan barang inventaris,

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sekolah juga tidak lagi memungut iuran dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa. Namun penggunaan dana BOS belum dilaksanakan secara maksimal karena adanya keterbatasan dalam pemanfaatan Dana BOS. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada ketepatan implementasi kebijakan Dana BOS dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” ditulis oleh Galih Wardana, Slamet Santoso dan Dewi Rostyaningsih. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan uraian mengenai pelaksanaan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 dan untuk menjelaskan apakah Dana BOS sudah dijalankan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Menggunakan tipe penelitian kualitatif, data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi BOS di SDN Tlogosari sudah efektif dengan melihat tercapainya indikator-indikator dalam meraih tujuan BOS. Namun terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan monitoring yang disebabkan oleh lambatnya proses verifikasi. Faktor-faktor yang mendorong implementasi adalah adanya dukungan dari pelaksana kebijakan dan adanya transparansi yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang maksimalnya sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BOS, belum maksimalnya kesiapan sumber daya, ketidakjelasan kewenangan, kurangnya sarana dan prasarana, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Penelitian yang

dilaksanakan oleh peneliti menggunakan indikator yang berbeda yaitu indikator ketepatan dari Riant Nugroho.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Putu Sucika dan I Nyoman Suprapta dengan judul “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan Dana BOS dalam membantu pemerataan pendidikan di SDN 1 Penarukan Kecamatan Buleleng pada tahun 2016 juga kesulitan yang dihadapainya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan berbagai persoalan terkait implementasi BOS di SDN 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa alokasi BOS di SDN 1 Penarukan sudah berhasil dan implementasinya sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran. Begitu pula dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi implementasi alokasi dana BOS sudah berjalan dengan baik. Adapun kesulitannya adalah adanya keterlambatan pencairan dana dan SDM juga sarana dan prasarana yang ada untuk membuat laporan Dana BOS terbatas. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis juga memfokuskan mengenai ketepatan pelaksanaannya berdasar aturan yang berlaku yaitu Juknis BOS Tahun 2018. Penelitian mengenai ketepatan pelaksanaan Dana BOS yang dilakukan peneliti menggunakan lima indikator ketepatan dari Riant Nugroho.

## **1.7. Kerangka Teori**

### **1.7.1. Konsep Administrasi Publik**

Nigro dan Nigro (Syafiie, 2010:23) memberikan definisi Administrasi Publik sebagai sebuah kerja sama kelompok yang ada di lingkungan pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pentingnya peranan Administrasi Publik dalam perumusan kebijakan menyebabkan Administrasi Publik masuk ke dalam bagian proses politik dan berkaitan dengan bermacam-macam kelompok dalam memberikan pelayanan masyarakat. Kelompok yang dimaksud yaitu swasta dan perorangan. Terdapat beberapa perbedaan dalam Administrasi Publik dan administrasi perorangan.

Litchfield (Syafiie, 2010:25) memberikan definisi administrasi Publik sebagai sebuah studi tentang berbagai organisasi pemerintahan yang memiliki tenaga-tenaga dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Waldo (Syafiie, 2010:25) juga mengungkapkan bahwa Administrasi Publik adalah kesatuan dari manajemen dan organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatannya yang bertujuan untuk mencapai harapan pemerintah.

Pendapat lain mengenai Administrasi Publik dijelaskan oleh Rosenbloom (Keban, 2008:6) yang memberikan batasan mengenai Administrasi Publik sebagai suatu proses yang memanfaatkan teori serta proses manajemen, politik dan hukum yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan fungsi pengaturan dan pelayanan masyarakat. Definisi yang disampaikan oleh Rosenbloom ini menitikberatkan pada proses institusional dari tiga bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Nicholas Henry (Keban, 2008:6) menjelaskan mengenai Administrasi Publik sebagai sebuah perpaduan antara praktik dan teori mengenai bagaimana peran pemerintah serta hubungannya dengan masyarakat juga dorongan terhadap keresponsifan kebijakan kepada kebutuhan sosial. Melalui Administrasi Publik, praktik-praktik manajemen dilembagakan agar lebih efektif, efisien dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi lebih baik.

Ruang lingkup yang dimiliki oleh Administrasi Publik cukup luas. Setidaknya terdapat enam unsur penting yang harus ada dalam Administrasi Publik, yaitu kebijakan, struktur organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Keenam unsur tersebut tidak dapat terlepas dari satu sama lain dan dalam pelaksanaannya keenamnya saling berkaitan.

### **1.7.2. Kebijakan Publik**

Pendapat pertama mengenai kebijakan publik datang dari Thomas R. Dye (Syafiie, 2010:10) yang mengemukakan definisi kebijakan publik sebagai “*what government choose to do or not to do*” atau segala sesuatu yang pemerintah pilih lakukan maupun tidak lakukan. Batasan mengenai kebijakan publik yang diberikan oleh Dye tersebut kurang memberikan perbedaan yang spesifik mengenai apa yang pemerintah putuskan untuk dilaksanakan dan apa yang pemerintah putuskan untuk tidak dilaksanakan.

Definisi selanjutnya datang dari Richard Rose dalam Winarno (2007:17) yang menyatakan bahwa kebijakan dapat dimengerti menjadi suatu rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan serta konsekuensi yang mengikuti bagi mereka yang memiliki kesangkutpautan. Dimana konsekuensi tersebut datang bukan

sebagai sebuah keputusan individu. Definisi lain yaitu berasal dari Carl Friedrich (Winarno 2007:17) yang memberikan pandangan bahwa kebijakan publik merupakan usulan tindakan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menimbulkan suatu hambatan dan peluang terhadap usulan kebijakan itu sendiri yang kemudian hambatan dan peluang tersebut digunakan dan diatasi dalam rangka untuk mencapai tujuan maupun untuk merealisasikan suatu maksud atau sasaran tertentu. Dimensi dari definisi tersebut sangatlah luas karena kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah namun juga kelompok tertentu.

Definisi kebijakan yang selanjutnya diberikan oleh Anderson. Anderson (Winarno, 2007:18) menyebutkan kebijakan yakni sebuah tindakan yang memiliki maksud yang ditentukan oleh sejumlah aktor dalam memecahkan sebuah permasalahan. Konsep kebijakan ini dinilai tepat sebab perhatiannya terpusat pada apa yang sebetulnya terjadi bukan pada apa yang dirumuskan dan dimaksudkan. Konsep ini juga memberikan perbedaan pada kebijakan dan keputusan yang merupakan pilihan antara alternatif yang ada.

Hill (Keban, 2008:66) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan prosedur dalam menyusun pilihan-pilihan kebijakan beserta dengan tahapan-tahapannya yang secara teori didasari dengan berbagai faktor atau pertimbangan, dan diwujudkan dalam model-model kebijakan publik. William Dunn (Dunn, 1998:24-25) mengemukakan lima tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu:

- a. Tahap penyusunan agenda

Pejabat publik terpilih menempatkan masalah pada tahap agenda kebijakan. Masalah-masalah terpilih melalui proses yang berkaitan dengan tingkat urgensi dan kepentingan masalah. Masalah terpilih tersebut kemudian masuk ke dalam tahap agenda kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masalah yang ada dimasukkan ke agenda kebijakan. Oleh sebab itu terdapat beberapa masalah menjadi tidak tersentuh dan tidak terselesaikan dalam waktu yang tidak terbatas.

b. Tahap formulasi kebijakan

Setelah masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut kemudian diulas. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh pejabat publik melalui perumusan alternatif kebijakan. Berbagai alternatif atau pilihan pemecahan kebijakan dirumuskan untuk dipilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif-alternatif yang sudah dirumuskan oleh perumus kebijakan dipilih yang terbaik dan diadopsi menjadi kebijakan berdasarkan dukungan dari dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan publik yang sudah dipilih dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang terpilih dan sesuai dengan kebijakan yang akan

dilaksanakan. Kebijakan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dengan menggerakkan sumber daya manusia dan finansial. Dalam beberapa kasus, implementasi suatu kebijakan bisa didukung maupun ditentang oleh implementor kebijakan.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahapan ini akan menilai atau mengevaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikan. Proses ini berguna untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat memecahkan suatu permasalahan karena pada dasarnya keberadaan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Sehingga terdapat kriteria-kriteria yang disusun untuk menjadi dasar dalam penilaian pencapaian tujuan kebijakan publik.

### **1.7.3. Konsep Implementasi Kebijakan**

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) memiliki pendapat mengenai implementasi kebijakan yaitu hal yang terjadi sesudah ditetapkannya undang-undang. Implementasi mencakup pada tindakan-tindakan para aktor kebijakan dalam menjalankan program atau kegiatan untuk meraih tujuan dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program, yaitu meliputi proses perolehan sumber daya yang dibutuhkan baik personal maupun peralatan, proses perumusan rencana dan desain program beserta penganggarnya, dan pengorganisasian kegiatan dengan membentuk unit-unit kerja.

Pendapat lain mengenai implementasi kebijakan datang dari Grindle (Winarno, 2014:149) yang menjelaskan bahwa implementasi memiliki tugas untuk membangun suatu ikatan yang mempermudah realisasi dari tujuan kebijakan. Dengan demikian peran dari implementasi meliputi terbentuknya “*a policy delivery system*”, yang mana terdapat sarana-sarana tertentu yang khusus dirancang dan diberlakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Peter de Leon dan Linda de Leon (Nugroho, 2015:217) menyebutkan mengenai tiga generasi yang ada dalam implementasi kebijakan. Berkembang pada tahun 1970-an, generasi pertama memberikan pemahaman bahwa implementasi merupakan wacana antara kebijakan dan pengimplementasiannya. Salah satunya disampaikan oleh Graham T. Allison (1971) mengenai keputusan dan implementasi Misil Kuba. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan lanjutan dari keputusan kebijakan.

Generasi kedua yang berkembang pada tahun 1980-an menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses *top-down* karena ada sistem hirarki dalam birokrasi. Hal ini memunculkan suatu perspektif bahwa birokrasi memiliki tugas untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditentukan oleh aktor kebijakan. Setelah *top-downer*, pada generasi kedua ini juga memunculkan ide *bottom-upper*.

Generasi selanjutnya yaitu generasi ketiga muncul pada tahun 1990-an. Salah satu tokoh dalam generasi ini adalah Malcolm L. Goggin (1990) yang mengungkapkan sebuah ide bahwa perilaku dalam implementasi kebijakan menentukan apakah

kebijakan akan berhasil atau gagal. Dengan demikian, pendekatan ini mengarah pada teori perilaku.

#### **1.7.4. Indikator Implementasi**

Nugroho (2014:240) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lima “tepat” yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan implementasi suatu kebijakan. Lima ketepatan tersebut yaitu:

- a. Tepat kebijakan yaitu melihat sejauh aman kebijakan mampu menyelesaikan suatu masalah. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang diperhatikan yaitu “*how excellent the policy is*” atau seberapa bagus kebijakan tersebut; apakah kebijakan ditetapkan sesuai dengan karakter permasalahan yang ingin diselesaikan; dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh badan yang memiliki wewenang;.
- b. Ketepatan pelaksana merujuk pada *stakeholder* yang berperan serta dalam implementasi sebuah kebijakan, yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sepenuhnya atau melalui kerja sama antara pemerintah dengan *stakeholder* lain. Lebih jauh lagi pemerintah dapat memberikan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Ketepatan target kebijakan melihat tiga hal yang penting; kesesuaian target di lapangan dengan target yang telah ditentukan; adanya tumpang tindih target; adanya konflik dengan target dari kebijakan lainnya.
- d. Ketepatan lingkungan yang terbagi menjadi dua lingkungan penentu, yaitu lingkungan internal yang mana terdapat interaksi antara badan yang

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan; dan lingkungan eksternal dari kebijakan.

- e. Ketepatan keputusan melihat terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan, yaitu:
  - 1) Penerimaan kebijakan. Pemahaman implementor mengenai kebijakan sebagai “aturan main” dan harus dijalankan dengan baik.
  - 2) Adopsi kebijakan. Adanya persetujuan dari publik mengenai kebijakan merupakan aturan main” dan harus dilaksanakan dengan baik.
  - 3) Kesiapan strategis. Kesiapan birokrat sebagai implementor utama dan publik turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

#### **1.7.5. Model-model Implementasi Kebijakan**

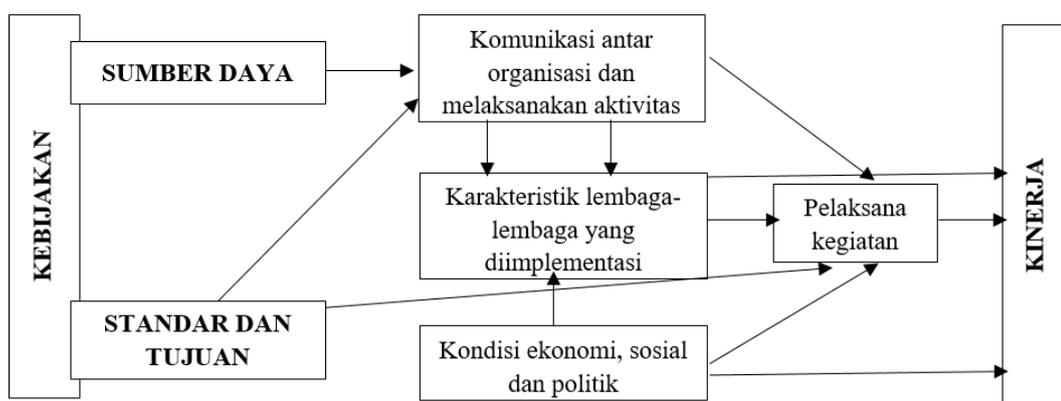
Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Nugroho (2015:219) memberikan asumsi bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan proses kebijakan. Melalui model implementasi ini disebutkan mengenai enam variabel yang berpengaruh dalam kinerja implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan tujuan kebijakan. Kedua variabel tersebut perlu diidentifikasi dan diukur dengan jelas karena keberhasilan atau kegagalan dari implementasi berdasar pada tujuan tersebut.
- b. Sumber-sumber daya. Pelaksanaan kebijakan perlu adanya dukungan dari berbagai sumber daya. Termasuk di dalam sumber daya yaitu sumber daya manusia dan non manusia atau dana.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Keberhasilan implementasi membutuhkan mekanisme-mekanisme dan

prosedur-prosedur lembaga. Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan diperlukan koordinasi dan dukungan dari organisasi lain untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.

- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik yang dimaksud adalah struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Variabel ini berfokus pada bagaimana kebijakan akan memberi pengaruh pada kondisi ekonomi dan sosial; apakah kebijakan mendapat dukungan dari elite atau penolakan.
- f. Kecenderungan pelaksana. Merupakan suatu hal yang penting mengenai bagaimana seorang pelaksana memahami tujuan suatu kebijakan ukuran-ukuran dasar yang ada di dalamnya. Kesadaran mengenai pentingnya kebijakan akan mendukung keberhasilan suatu kebijaksanaan secara menyeluruh.

**Gambar Error! No text of specified style in document..1 Model Implementasi van Meter dan van Horn**



Sumber: Nugroho (2015:220)

George C. Edwards (Winarno, 2014:177) menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi.

#### a. Komunikasi

Tiga hal penting dibahas oleh Edwards dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian keputusan kebijakan yang telah dibuat. Kemudian instruksi-instruksi yang disampaikan mengenai implementasi harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakannya. Selanjutnya apabila kebijakan ingin diimplementasikan secara efektif diperlukan konsistensi dalam perintah-perintah pelaksanaan kebijakan.

#### b. Sumber daya

Berpengaruh pula dalam implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya. Faktor ini penting keberadaannya dalam implementasi kebijakan. Terdapat beberapa sumber daya yang termasuk ke dalam faktor ini, yaitu sumber daya manusia dengan keahliannya untuk melaksanakan tugas, informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, wewenang juga fasilitas yang menunjang implementasi

suatu kebijakan. Keempat sumber daya tersebut harus terpenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

**c. Kecenderungan pelaksana**

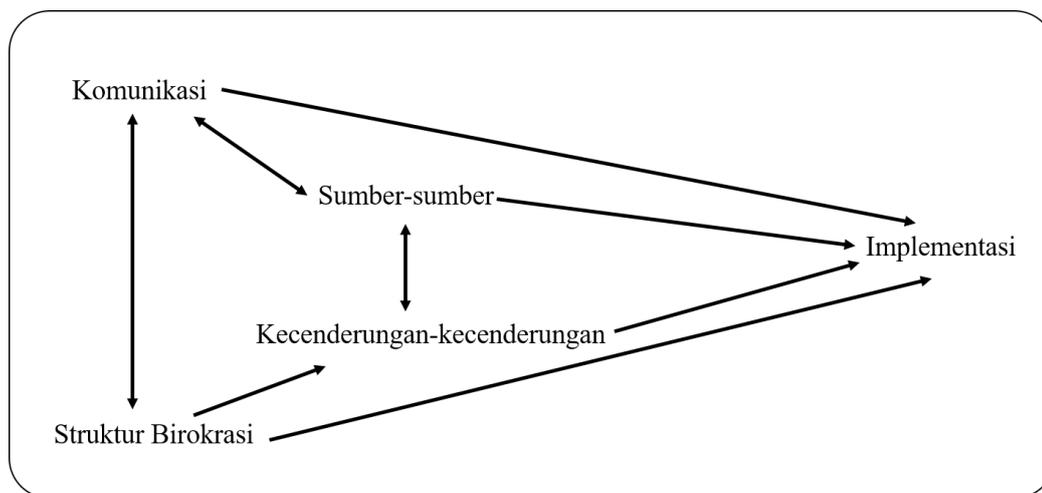
Kecenderungan pelaksana meliputi bagaimana pelaksana kebijakan bersikap atas kebijakan tersebut. Jika pelaksana kebijakan bersikap baik dengan memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan maka kemungkinan implementor kebijakan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah disusun oleh perumus kebijakan. Sebaliknya, jika implementor berbeda dalam pandangannya mengenai kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

**d. Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi dimana kebijakan diimplementasikan akan memiliki pengaruh pada keberhasilan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi ini menyangkut prosedur kerja yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kebijakan atau yang dikenal sebagai *Standart Operating System* (SOP).

Untuk lebih jelasnya, model implementasi yang disampaikan oleh Edwards III dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar Error! No text of specified style in document..2 Model Implementasi Kebijakan Edwards III**



Sumber: Winarno (2014:211)

Model implementasi kebijakan yang lain disampaikan oleh Grindle. Grindle (Tahir, 2015:74) memandang suatu implementasi kebijakan akan ditentukan oleh sisi kebijakan dan konteks dari implementasi kebijakan itu sendiri. Grindle mengungkapkan dalam teorinya bahwa tahap implementasi kebijakan dapat dimulai bila sasaran dan tujuannya sudah ditetapkan, program-program sudah selesai disusun, dan dana sudah dialokasikan untuk dapat meraih sasaran dan tujuan tersebut. Grindle menyebutkan isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

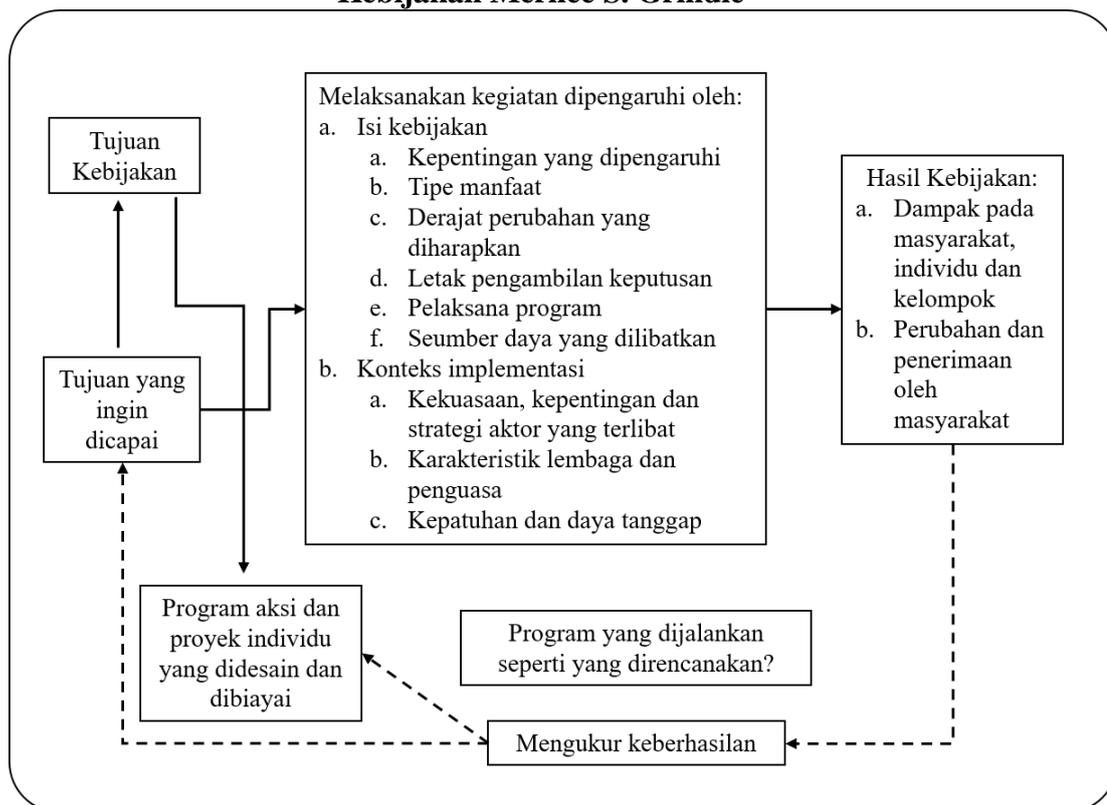
Sedangkan yang dimaksud dengan konteks tujuan menurut Grindle, adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa,

- c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Untuk lebih jelasnya, model implementasi kebijakan dari Grindle dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

**Gambar Error! No text of specified style in document..3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**



Sumber: Tahir (2015:75)

Peneliti melaksanakan penelitian mengenai ketepatan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Melalui prinsip implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Riant Nugroho tersebut dapat diketahui prinsip ketepatan mana yang belum sesuai dengan yang seharusnya.

## **1.8. Operasionalisasi Konsep**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa ketepatan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Terdapat tiga fenomena penelitian yang dapat diidentifikasi, yaitu:

### **a. Pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.**

Petunjuk Teknis Dana BOS menyebutkan bahwa terdapat empat tahapan penting dalam pelaksanaan Dana BOS, yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban. Adapun penjabaran dari fenomena yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Pengalokasian Dana BOS
  - a) Kegiatan yang dilaksanakan oleh SDN 2 Kwadungan Gunung sebelum Dana BOS disalurkan ke sekolah.
  - b) Penganggaran Dana BOS oleh SDN 2 Kwadungan Gunung.
- 2) Penyaluran Dana BOS
  - a) Proses penyaluran Dana BOS ke SDN 2 Kwadungan Gunung.
- 3) Penggunaan Dana BOS
  - a) Komponen yang dibiayai oleh Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS.
- 4) Pertanggungjawaban Dana BOS
  - a) Penyusunan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS secara tertulis.

- b) Pertanggungjawaban Dana BOS secara *online* melalui laman resmi Dana BOS.

**b. Ketepatan pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung**

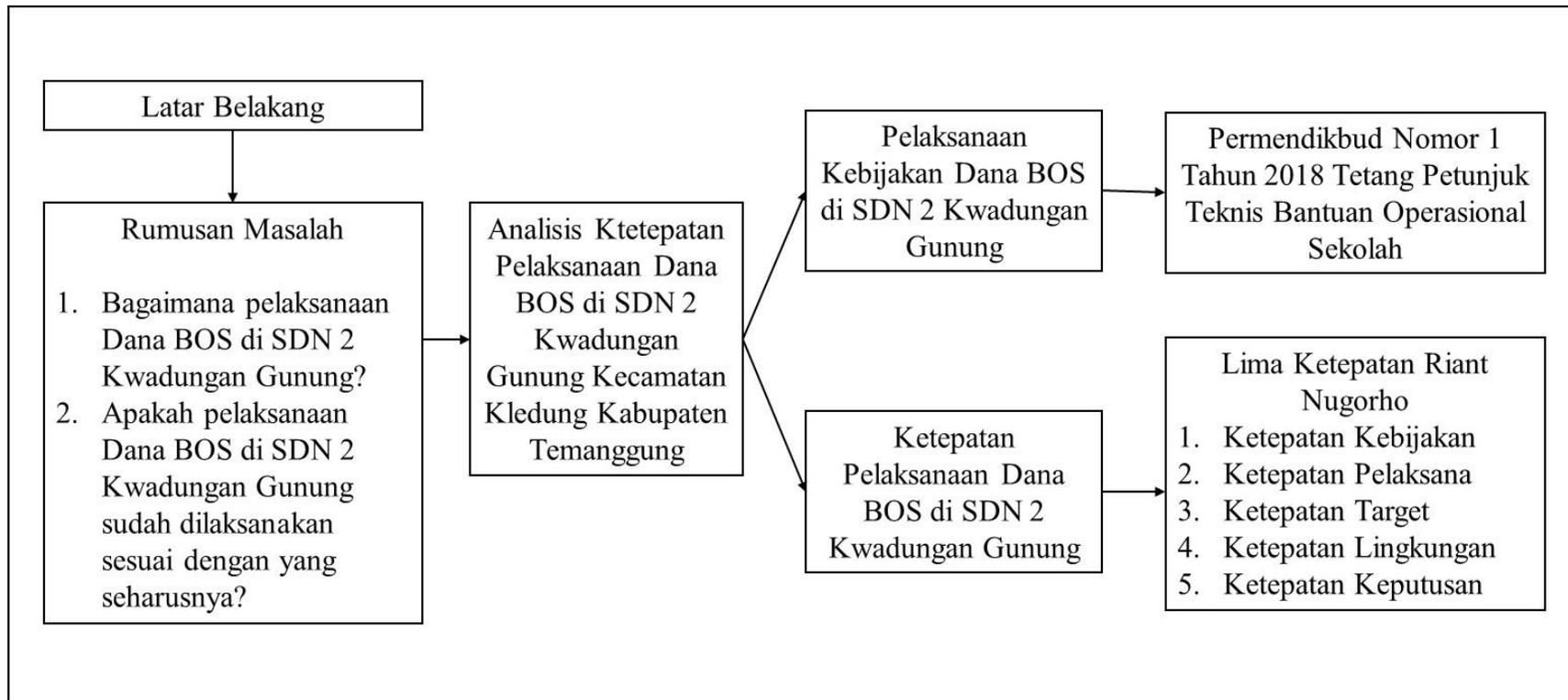
Ketepatan pelaksanaan Dana BOS di SDN akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan indikator lima ketepatan dari Riant Nugroho, yaitu:

- 1) Ketepatan kebijakan
  - a) Peran Dana BOS dalam membantu mengurangi Angka Putus Sekolah di SDN 2 Kwadungan Gunung.
  - b) Kebijakan Dana BOS dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
- 2) Ketepatan pelaksana
  - a) Pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan Dana BOS.
  - b) Peran dan fungsi pelaksana dalam implementasi kebijakan Dana BOS baik di tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung maupun sekolah.
- 3) Ketepatan target kebijakan
  - a) Tujuan Dana BOS.
  - b) Sasaran dari Dana BOS.
  - c) Penerimaan sasaran kebijakan dengan adanya kebijakan Dana BOS dan manfaat yang diterimanya.
- 4) Ketepatan lingkungan
  - a) Lingkungan internal

- Interaksi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dengan SDN 2 Kwadungan Gunung dalam pelaksanaan Dana BOS.
- b) Lingkungan eksternal
- Persepsi dari orang tua/wali murid di SDN 2 Kwadungan Gunung terkait Dana BOS.
- 5) Ketepatan keputusan
- a) Pemahaman pelaksana Dana BOS mengenai Juknis BOS sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b) Kesiapan pelaksana Dana BOS dalam melaksanakan Dana BOS.

### 1.8.1. Kerangka Berpikir

Gambar Error! No text of specified style in document..4 Kerangka Berpikir Penelitian



## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Desain Penelitian**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mendapat pemahaman mendetail akan suatu objek penelitian. Terdapat teori awal yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami dan menyusun permasalahan dalam penelitian agar lebih fokus. Penelitian kualitatif ini menunjukkan suatu kondisi atau realitas yang belum terungkap menjadi tampak, nyata dan eksplisit.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus. Melalui metode studi kasus ini peneliti diharapkan dapat mendeskripsikan implementasi Dana BOS secara mendalam utamanya yang memiliki kaitan dengan ketepatan pelaksanaannya terhadap aturan yang telah diatur dalam Juknis BOS Tahun 2018. Ketepatan pelaksanaan kebijakan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam panduan penggunaan Dana BOS adalah penting karena akan berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Temanggung dengan sampel penelitian yaitu SD Negeri 2 Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Selain itu penulis juga memperoleh data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

### 1.9.3. Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten Temanggung yang terdiri dari:

- a. Penanggung jawab Dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
- b. Tim Manajemen BOS SDN 2 Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung yang terdiri dari:
  - 1) Kepala Sekolah;
  - 2) Bendahara BOS;
  - 3) Komite sekolah dan wali murid.

Informan-informan tersebut merupakan pihak yang memahami pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOS di tingkat kabupaten dan di tingkat sekolah. Informan ditunjuk menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai tema dan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan sebagai berikut.

- a. Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- b. Kepala Sekolah SDN 2 Kwadungan Gunung;
- c. Bendahara BOS SDN 2 Kwadungan Gunung; dan
- d. Komite dan wali murid SDN 2 Kwadungan Gunung.

Penulis menentukan 8 (delapan) informan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan. Berikut merupakan informan dalam penelitian ini.

**Tabel Error! No text of specified style in document..2 Data Informan**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan Informan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Informan 1	Kasi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Dikdas /PPTK (SD)
2.	Informan 2	Staf Dikdas/Staf Administrasi Dana BOS (SD)
3.	Informan 3	Staf Dikdas/Ketua Seksi Pendataan Dana BOS (SD)
4.	Informan 4	Staf Seksi Kesiswaan
5.	Informan 5	Kepala Sekolah SDN 2 Kwadungan Gunung
6.	Informan 6	Bendahara SDN 2 Kwadungan Gunung
7.	Informan 7	Komite Sekolah/Wali Murid
8.	Informan 8	Wali Murid

#### **1.9.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa non-numerik atau berupa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan-informan yang telah dipilih menjadi subjek penelitian dan data sekunder yang berasal dari data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik tingkat nasional maupun kabupaten; data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung; dan Laporan keuangan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung..

#### **1.9.5. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Perlu adanya rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peneliti untuk mengamati dan memahami permasalahan yang diambil dalam penelitian yang diambil. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk memberikan pandangannya dan mengambil makna dari data yang diperoleh. Data yang diperoleh tersebut harus dipahami dan dipisahkan dengan hal-hal yang tidak bersangkutan dengan penelitian yang diambil. Selain itu,

peneliti harus mampu mendekati diri dengan narasumber terpilih dalam penelitian sehingga terdapat kerja sama yang baik antara peneliti dengan narasumber. Adanya instrumen penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data penelitian yang cukup dan sesuai dengan fokus daripada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Beberapa instrumen yang kerap dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Wawancara mendalam;
- b. Observasi; dan
- c. Dokumentasi.

Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan buku catatan, pedoman wawancara dan kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian.

#### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya digunakan oleh peneliti untuk ditanyakan kepada informan pada saat wawancara mendalam (panduan wawancara terlampir dalam Lampiran). Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara dikembangkan oleh peneliti pada saat proses wawancara berlangsung. Proses wawancara bersama dengan informan-informan direkam dengan menggunakan alat perekam. Adapun informan-informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dan Kepala sekolah dan bendahara BOS SDN 2 Kwadungan Gunung juga anggota komite sekolah dan wali murid.

### **1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Proses pengolahan dan analisis data dilaksanakan setelah data sudah selesai dikumpulkan melalui wawancara yang direkam menggunakan perekam audio. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut.

a. Transkrip data

Tahapan ini merupakan tahap dimana data mentah diubah ke dalam bentuk tulisan (baik berasal dari alat perekam maupun catatan lapangan). Transkrip yang ditulis sebagaimana adanya dalam perolehan data.

b. Kategorisasi data

Pada tahap ini peneliti membaca seluruh data yang sudah ditranskrip dengan teliti. Data mengenai pelaksanaan Dana BOS di SDN 2 Kwadungan Gunung dikategorisasikan berdasarkan tahap pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban.

Deskripsi implementasi

c. Implementasi Dana BOS digambarkan sebagaimana adanya sesuai dengan data yang telah dikategorisasikan.

d. Analisis ketepatan

Implementasi kebijakan di lapangan selanjutnya dikaji tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan pada petunjuk teknis Dana BOS Tahun 2018. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sekolah mengimplementasikan Dana BOS dengan peraturan yang

berlaku. Analisis kesesuaian ini menggunakan lima ketepatan dari Riant Nugroho.

e. **Penyimpulan**

Prsoes penyimpulan penelitian didasarkan pada implemetasi BOS yang telah digambarkan dan analisis ketepatan pelaksanaannya.

### **1.9.8. Kualitas Data**

Data yang telah diperleh dalam penelitian kemudian harus diperiksa keaabsahannya. Validitas data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat akurasi daripada temuan yang diperoleh dalam proses penelitian (Creswell 2014:286). Validitas data ini dilaksanakan degan menggunakan berbagai prosedur.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan oleh peneliti dalam memeriksa validitas data hasil penelitian. Beberapa diantaranya yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan observasi, triangulasi dan diskusi degan teman (Samsu, 2017:100). Peneliti menggunakan teknik validitas triangulasi dalam memeriksa hasil penelitian ini. Teknik triangulasi memanfaatkan hal-hal lain di luar data yang diperoleh dari penelitian. Patton dalam Samsu (2017:101) menyebutkan terdapat tiga bentuk triangulasi yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan hasil penelitian, yaitu:

a. **Triangulasi sumber**

Melalui triangulasi ini data penelitian dibandingkan dan diperiksa kembali kebenaran dan kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

b. Triangulasi teori

Triangulasi ini menekankan bahwa hasil penelitian yang diperoleh harus dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan menggunakan dua teori atau lebih.

c. Triangulasi data

Triangulasi ini diterapkan dengan memeriksa data-data hasil wawancara dengan hasil observasi.

Teknik triangulasi sumber data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.. Proses penilaian kebasahan data dilaksanakan dengan melakukan perbandingan dan pengecekan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber data disebabkan metode tersebut dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data.